

## PEMBERDAYAAN SEKOLAH DAN KOMITE SEKOLAH (Studi Evaluasi Kebijakan Pada Program BOS Di Kabupaten Pacitan)

Sugeng Suryanto<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

### Abstract

*School Operational Aid (BOS) is a government policy through the Ministry of Education and Culture, which is fully authorized its management to the schools by referring to the conditions set by the government. Schools with School Committee work together in utilizing the BOS funds to improve access and quality of education. With the implementation of BOS policy on school, then it have need of evaluating the BOS policy which this study discuss the empowerment of schools and the School Committee in the management of BOS. The problems of this research are about how: (1). The level of policy performance of the BOS program; (2). The level of policy effectiveness of BOS program; (3). The level of policy outcome of the BOS program; (4). The policy impact of the BOS program. These four issues are analyzed in relation to empowerment of school and school committee. This research applied descriptive qualitative method, with the data in the form of descriptions of the activities, work systems or behaviors exist in Pacitan Education Department, Schools and the School Committee recipient of BOS funds as the subject of the research. Data obtained by interview, observation and documentation studies. From the data analysis and discussion, it is concluded as follows: First: The level of performance of the BOS policy have achieved the objectives which the BOS has been targeted to help the poor students and ease the burden of other students; Second: The level of efficiency indicates that with the lack of BOS funds schools can still carry out activities to reach the standard results; Third: The level of outcomes have succeeded in increasing APK, control for APS, graduates proceed to a higher level, the BOS fund management transparent and accountable, the increase of parents participation in helping schools, results of Nilai Ebtanas Murni (NEM) increases, an increasing number of schools are accredited B; Fourth: The impact of policy on the BOS program, among others, the increase in the Human Development Index (HDI), the increase in students passing the national exam and an increase in per capita income. Empowerment Schools and School Committee be realized where the school and the school committee has been undergoing development, strengthening the potential / power and independence.*

**Keywords:** *empowerment, School and School Committee, Policy on the BOS program.*

## 1. PENDAHULUAN

Mencermati Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib

mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dengan demikian maka sebagai konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Dari data yang diperoleh posisi Indonesia adalah(1) Diantara 104 negara Indonesia menduduki rangking ke-69 dalam Indeks Daya Saing Pertumbuhan, Singapura No 7, Malaysia No 31 dan Thailand No 34. (*Word Economic Forum, 2004:xiii*);(2) Diantara 148 negara Indonesia menduduki rangking ke-38 dalam indeks keseluruhan dengan komponennya: kebutuhan dasar, efisiensi dan inovasi. Singapura No 2 Malaysia No 24 dan Thailand No 37. (*Klaus Schwab, 2014:16*);(3) Diantara 148 negara Indonesia menduduki rangking ke-72 dalam indeks pendidikan dan kesehatan. Singapura No 2, Malaysia No 33 dan Thailand No 81. (*Klaus Schwab, 2014:18-19*).

Perkembangan taraf ekonomi masyarakat Indonesia tergolong masih rendah dimana jumlah penduduk miskin pada Pebruari 2005 berjumlah 35,10 juta atau 15,97% dengan fluktuatif pada tahun 2006 justru penduduk miskin bertambahnaik jumlahnya menjadi 39,05 juta atau 17,75%. (Badan Pusat Statistik, 2007:2). Kondisi Kabupaten Pacitan pada tahun 2005 untuk Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SD/MI adalah 96,13% sedangkan APM untuk SMP/MTs 68,57% dan Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk SD/MI adalah 112,55% sedangkan APK untuk SMP/MTs 88,33%.. (Bupati Pacitan, 2006:132).

Perkembangan bidang kesejahteraan sosial pada Kabupaten Pacitan tahun 2012 sbb: Jumlah penduduk mencapai 586.595 jiwa dengan penduduk miskin 17,07%. Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SD/MI adalah 98,91 % sedangkan APM untuk SMP/MTs 82,72 % hal ini dapat dimaknai bahwa dari 100 orang siswa umur 7-12 tahun terdapat sekitar 99 orang yang bersekolah di SD/MI dan dari 100 orang siswa berumur 13-15 tahun terdapat sekitar 83 orang siswa bersekolah di SMP/MTs. Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk SD/MI/Paket A adalah 103,11% sedangkan APK untuk SMP/MTs/Paket B adalah 97,34%, hal ini dapat dimaknai bahwa terdapat sekitar 103,11 % orang siswa umur 7-12 tahun atau lebih bersekolah di SD/MI/Paket A yang mestinya ditempati oleh siswa yang berumur 7-12 tahun saja. APK untuk SMP/MTs/Paket B sebesar 97,34% dimaknai dengan terdapat sekitar 97,34% orang siswa umur 13-15 tahun atau lebih bersekolah di SMP/MTs/Paket B yang mestinya ditempati oleh siswa yang berumur 13- 15 tahun. (LPPD Kabupaten Pacitan tahun 2012)

Pada dasarnya pengelolaan dana BOS sepenuhnya berada dibawah tanggung jawab sekolah, dimana untuk pengelolaan dana BOS sebagai penanggung jawab utama berada pada Tim Manajemen BOS Sekolah (Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2012:14).

Pemberian kewenangan pengelolaan dana BOS kepada sekolah merupakan perubahan yang terjadi dari era sebelumnya bahwa berdasarkan paradigma lama dominasi negara sangat kuat. Negara telah melakukan penetrasi sampai pada kehidupan masyarakat tingkat terbawah, dengan demikian pada pengelolaan dana BOS perubahan dalam rangka memberikan kewenangan kepada masyarakat terutama dalam proses pengambilan keputusan, peran dan dominasi negara tersebut mulai

dikurangi dan menyerahkan sebagian, kewenangannya kepada masyarakat. (Sutomo, 2011:125-126). Dengan telah terelisasinya dana BOS maka perlu adanya evaluasi kebijakan BOS didalamnya memuat tingkat kinerja program BOS, tingkat efisiensi program BOS, tingkat outcome program BOS dan dampak program BOS yang hasilnya dapat digunakan sebagai acuan untuk menindaklanjuti kebijakan yang sudah berjalan.

Dalam hal pemberdayaan sekolah dan komite sekolah adalah upaya untuk memampukan dan memandirikan dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran terhadap potensi yang dimilikinya untuk lebih berdaya guna dan berhasil guna. Pemberdayaan sekolah dan komite sekolah dapat dilihat dari pengembangan, penguatan potensi atau daya dan kemandirian. Sulistiyani (2004:78). Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dirumuskan masalah penelitiannya sebagai berikut: Bagaimanakah tingkat kinerja Sekolah pada program BOS, terhadap pemberdayaan Sekolah dan Komite Sekolah di Kabupaten Pacitan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tingkat efisiensi Sekolah pada program BOS, terhadap pemberdayaan Sekolah dan Komite Sekolah di Kabupaten Pacitan?
2. Bagaimanakah tingkat keluaran (*outcome*) Sekolah pada program BOS, terhadap pemberdayaan Sekolah dan Komite Sekolah di Kabupaten Pacitan?
3. Bagaimanakah dampak program BOS pada Sekolah, terhadap pemberdayaan Sekolah dan Komite Sekolah di Kabupaten Pacitan?

## 2. KAJIAN TEORI

### Teori Pemberdayaan

Pemberdayaan menurut Ife (1995:56) ditulis "*empowerment aims to increase the power of disadvantage*", dimana pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan atas mereka yang kurang beruntung. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya gerakan terus menerus untuk menghasilkan suatu kemandirian (*self propelled development*). Pemberdayaan harus berawal dari kemauan politik (*political will*), dimana hubungan kerja yang serasi dan kerjasama yang harmonis dikatakan mutlak karena seperti diketahui, ada ungkapan yang mengatakan bahwa apabila proses politik berakhir, proses administrasi mulai ("*when politics ends, administrasi begins*"). Siagian (2009: 49)

Dikuatkan pendapat Payne (1997:266) yang mengemukakan mengenai pemberdayaan sebagai berikut:

*"to help clients gain power of decision and action over their own lives by reducing the effect of sosial or personal blocks to exercising cacity and self-confidence to use power and by transferring power from the environment to clients"*.

Pendapat tersebut mengandung arti bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk membantu masyarakat memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan mereka lakukan yang terkait dengan diri mereka sendiri, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Mereduksi dari pendapat Panarka dan Vidhyandika (1996), Parsons (1994), Edi Suharto (2004), Ife (1995) dan Sulistiyani (2004:78) bahwa intisari dari pemberdayaan ada 3 (tiga) hal yaitu: pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya, terciptanya kemandirian.

## Pemberdayaan Sekolah dan Komite Sekolah

Mencermati UU No.32 Tahun 2004 yang mengamanatkan adanya desentralisasi pendidikan maka setiap sekolah di Indonesia memberlakukan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Sekolah sebagai suatu sistem terdiri atas beberapa elemen, yang antara satu elemen dengan elemen lainnya saling berkaitan dan saling pengaruh mempengaruhi. Elemen pada sistem sekolah adalah: Peserta didik (anak didik, siswa), Kepala sekolah, Pendidik atau guru, Staf tata usaha, Kurikulum, Fasilitas pendidikan lainnya. (Departemen Pendidikan Nasional, 2006:9). Dengan demikian maka pemberdayaan sekolah dapat dimaknai dengan pemberdayaan elemen-elemen sekolah terkait dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dengan demikian maka konsep-konsep pemberdayaan masyarakat dapat berlaku pada pemberdayaan sekolah. Sekolah melalui Tim Manajemen BOS Sekolah mendapat kewenangan penuh untuk mengelola dan menggunakan dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan untuk operasional sekolah. (Permendiknas RI No 51 Tahun 2011)

Komite Sekolah merupakan penyempurnaan dan perluasan badan kemitraan dan komunikasi antara sekolah dengan masyarakat. Komite Sekolah merupakan perwakilan masyarakat yang berbuat dan melangkah sesuai dengan kepentingan masyarakat. Mengacu kepada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 terdapat 4 (empat) peran dan 7 (tujuh) fungsi Komite Sekolah dimana peran Komite Sekolah sekolah meliputi: (1) Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di sekolah; (2) Pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah; (3) Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transportasi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di sekolah; (4) Mediator antara pemerintah dengan masyarakat. Sedangkan fungsi Komite Sekolah adalah : (1) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; (2) Melakukan kerjasama dengan masyarakat; (3) Menampung dan menganalisa aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat; (4) Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada sekolah mengenai Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS), kriteria kinerja satuan pendidikan dan hal-hal yang terkait dengan pendidikan; (5) Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan; (6) Menggalang dana masyarakat; (7) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.

## Kebijakan Publik Dan Kebijakan BOS

Batasan umum dari suatu negara adalah mempunyai kedaulatan/ merdeka, mempunyai wilayah, terdapatnya rakyat dan pemerintahan. Dalam kehidupan sering dikemukakan tentang adanya peraturan yang berlaku bagi semua orang dalam komunitas kehidupan bersama. Semua peraturan sifatnya adalah umum berlaku bagi semua manusia yang hidup pada suatu wilayah negara akan terbentuk kesadaran antara satu dengan yang lain tidak saling merugikan namun terjadi kemajuan yang menguntungkan bersama. Kebijakan publik adalah keputusan atau peraturan yang dibuat oleh yang berwenang untuk mengatasi masalah publik sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan baik. Ciri utama kebijakan publik adalah suatu peraturan atau ketentuan yang diharapkan mengatasi masalah publik. Secara etimologis, istilah *policy* (kebijakan) berasal dari bahasa Yunani, Sangsekerta dan Latin. Dari akar kata dalam bahasa Yunani dan Sangsekerta polis (negara-kota) dan pur (kota) dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi politia (negara), terakhir dalam

bahasa Inggris pertengahan *policie*, yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. (Dunn, 2000: 51).

BOS merupakan kebijakan pemerintah untuk mengatasi problema pendidikan pada masyarakat yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7–15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pada pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimum pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, penegasan pada ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Yang dimaksud dengan tingkat pendidikan dasar adalah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau pendidikan lain yang sederajat. Secara umum tujuan dari program BOS adalah untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.

### **Evaluasi Kebijakan**

Menurut Dunn (2000:25) dan Parson (1997:543) secara umum siklus suatu kebijakan meliputi formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan. Sifat kebijakan kompleks dimana terdapat saling ketergantungan menurut Islamy (1997: 102-106) bentuk sifat kebijakan dibagi menjadi dua bentuk yaitu: (1) Bersifat Self-Executing yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan disyahrkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terimplementasikan dengan sendirinya misalnya pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan negara lain; (2) Bersifat Non-Self-Executing bahwa suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai. Dalam konteks ini kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) termasuk kebijakan yang bersifat Non-Self-Executing karena perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan tercapai.

Menurut Dunn (2000: 609-610), Riant Nugroho Dwijowiyoto (2007: 263) dan Subarsono (2013:120-121) evaluasi kebijakan dilakukan dengan melakukan penilaian komprehensif untuk digunakan: (1) Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan dimana pencapaian target kebijakan yang menjadi bahasan; (2) Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan disini diperoleh pemahaman biaya dan manfaat dari suatu kebijakan; (3) Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) atau pencapaian tujuan suatu kebijakan; (4) Mengukur dampak suatu kebijakan; (5) Untuk mengetahui penyimpangan antara target dan pencapaian tujuan; (6) Sebagai bahan masukan (*input*) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik dengan memberikan rekomendasi untuk menanggulangi kesenjangan

Dari uraian tersebut diatas penyimpangan yang mungkin terjadi dan pemberian masukan bagi proses kebijakan selanjutnya baru dapat dilaksanakan setelah 4 (empat) kegiatan meliputi penentuan tingkat kinerja kebijakan BOS, mengukur tingkat efisiensi kebijakan BOS, mengukur tingkat keluaran (*outcome*) kebijakan BOS dan mengukur dampak kebijakan BOS, sesuai tujuan kegiatan telah selesai dilaksanakan

## Evaluasi Kebijakan Pada Program BOS di Kabupaten Pacitan

Pada evaluasi kebijakan BOS membahas tentang tingkat kinerja, tingkat efisiensi, tingkat Outcome dan dampak dari kebijakan program BOS. Adapun penjelasan secara rinci yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

### Tingkat Kinerja Pada Program BOS

Menurut pendapat Bernadin&Russel (1993:397) tentang kinerja menuliskan bahwa “... *the record of outcomes produced on a specified job function or activity during a specified time period* ...” Dalam hal pernyataan ini aspek ditekankan kepada catatan tentang outcome atau hasil akhir yang diperoleh setelah aktivitas dijalankan dalam kurun waktu tertentu.

Selanjutnya Pasolong (2010:175) menjelaskan bahwa konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (individu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. Kinerja perseorangan sangat dipengaruhi banyak hal, dari pengaruh-pengaruh tersebut yang menonjol adalah pada kecakapan dan pengetahuan seseorang. Sedangkan kinerja organisasi adalah hasil kerja yang dicapai oleh organisasi. Kinerja pegawai dan organisasi memiliki keterkaitan yang sangat erat. Sedangkan menurut pendapat dari Robbins (2001: 273) bahwa: “Sejumlah faktor struktural menunjukkan suatu hubungan kinerja. Diantara factor yang lebih menonjol adalah persepsi peran, norma, inekuitas status ukuran kelompok, susunan demografinya, tugas kelompok dan kekohesifan”

Selanjutnya menurut Rue&Byars (1981:375) , Murphy& Clevelan (1993:113) yang dikutip Pasolong (2011:113) mengatakan bahwa kinerja adalah sebagai tingkat pencapaian hasil dengan memperhatikan kualitas perilaku yang berorientasi kepada tugas dan pekerjaan.

Dalam hal pelaksanaan BOS yang dominan berlaku adalah menyangkut kinerja organisasi dimana kinerja Tim Manajemen BOS mulai tingkat Pusat sampai dengan tingkat sekolah bertanggung jawab dalam pengelolaan dana BOS yang didukung oleh Komite Sekolah yang berperan sebagai advisor (pertimbangan) kepada sekolah dalam melangkah untuk mencapai visi, misi dan tujuan sekolah, support (dukungan) terkait dengan program-program sekolah termasuk finansialnya, control (pemeriksa) yaitu memeriksa semua langkah yang dilakukan oleh sekolah telah sejalan dengan perencanaan ada penyimpangan dengan demikian semua penyimpangan yang terjadi pada kegiatan sekolah segera terdeteksi dan mendapatkan upaya untuk mendapatkan pengarahan kejalan yang benar dan mediator (penghubung) antara sekolah dengan pemerintah dalam hal jika terdapat kesulitan dalam melangkah dalam melaksanakan program yang sudah disusun sekolah.

### Tingkat Efisiensi Pada Program BOS

Untuk mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan dilakukan dengan evaluasi dapat diketahui seberapa besar biaya dan manfaat dari suatu kebijakan. Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Menurut Dunn (2000: 430) efisiensi merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi yang merupakan hubungan antara efektivitas dengan usaha yang pada umumnya diukur dari ongkos moneter. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.

Efisiensi dan efektifitas merupakan rangkaian kata yang sering digunakan dalam tujuan aplikasi berbagai paradigma manajemen dan juga dalam pelayanan publik. Kecukupan (*adequasi*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan masalah. Kriteria

kecukupan menekankan kepada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Efisiensi program BOS ditandai dengan sejauhmana sumberdaya pada Organisasi Pelaksana BOS yang dipergunakan untuk pelayanan kegiatan yang mempergunakan dana BOS.

### **Tingkat Outcome Pada Program BOS**

Secara umum terdapat hubungan antara *input*, *output* dan *outcome*. Input merupakan bahan baku (*raw materials*) yang digunakan sebagai masukan dalam sebuah system kebijakan. Dengan pengertian bahwa input dapat berupa sumberdaya manusia, sumberdaya financial, tuntutan-tuntutan dukungan masyarakat. (Subarsono, 2013: 121). Mekanisme proses pergeseran dari input menjadi output melalui konversi dimana pada system politik melalui aktor yang berada didalamnya melakukan. Selama [proses konversi terjadi *bargaining* dan *negosiasi* antar para actor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan, yang masing-masing memiliki kepentingan mungkin sama atau mungkin berbeda. Output merupakan hasil dari konversi dapat dimaknai merupakan resultante dari tarik-menarik antar kepentingan para aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan.

Pemahaman mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan. Indikator hasil (*outcome*) merupakan segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). *Outcome* adalah hasil yang diperoleh sebagai akibat dari program BOS yang telah diimplementasikan.

### **Dampak Pada Program BOS**

Evaluasi dampak kebijakan merupakan tahapan akhir dalam studi kebijakan publik untuk menilai seberapa jauh kebijakan publik dapat membuahkan hasil dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan kebijakan. Tujuan dari BOS secara umum untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Sedangkan secara khusus: (1) Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa pada pendidikan dasar; (2) Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin di seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta; (3) Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta. (Permendiknas RI No 51 Tahun 2011). Memperhatikan pemahaman diatas maka dampak yang terjadi didalam program (internal) adalah secara keseluruhan masyarakat terbebas dari himpitan dengan menanggung biaya sekolah bagi anaknya sedangkan eksternal adalah tercapainya keberhasilan mempertahankan angka partisipasi baik APK maupun APM dan peningkatan mutu pendidikan.

## **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan kualitatif. Hal itu didasarkan pada rumusan masalah penelitian yang menuntut peneliti untuk melakukan eksplorasi dalam memahami dan menjelaskan masalah-masalah yang diteliti. Secara umum dalam penelitian kualitatif peneliti dapat memilih beberapa teknik pengumpulan data tertentu antara lain: (1) Observasi Partisipasi (2) Wawancara mendalam (3) *Life history* (4) Analisis Dokumen (5)

Catatan Harian Peneliti (rekaman pengalaman dan kesan peneliti pada saat pengumpulan data dan (6) Analisis Isi Media. (Bungin,2001:173).

Dalam penelitian kualitatif ini penulis menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dari sumber data dengan pertimbangan tertentu.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Pentingnya Program BOS di Kabupaten Pacitan**

Pelayanan pendidikan merupakan kegiatan yang sangat penting dalam berjalannya proses pembelajaran dimana pada ujungnya diharapkan dapat menunjang keberhasilan pendidikan pada bidang peningkatan kualitas peserta didik. Peningkatan mutu/kwalitas peserta didik adalah salah satu modal dasar dalam peningkatan sumber daya manusia, dengan sumber daya manusia yang mempunyai keunggulan maka dapat berkontribusi kepada kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan sehingga negara dapat untuk menyesuaikan diri dengan negara-negara lain. Di Indonesia realisasi peningkatan mutu pendidikan diawali dengan keberhasilan perluasan akses menuju kepada peningkatan kualitas pada pendidikan dasar (Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Secara khusus program BOS bertujuan untuk membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT (Terbuka) negeri terhadap biaya operasi sekolah meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa disekolah swasta. Di Kabupaten Pacitan BOS masih sangat diperlukan karena pada kenyataannya warga miskin di Kabupaten Pacitan masih mencapai 17,07 % (Sumber LPPD Kabupaten Pacitan Tahun 2012), sehingga memerlukan dana bantuan untuk menuntaskan wajib belajar.

##### **Mekanisme Penentuan Penerima Dana BOS di Kabupaten Pacitan.**

Penentuan penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di kabupaten Pacitan melalui proses pendataan siswa setiap sekolah oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten untuk dilanjutkan penyelesaiannya secara berjenjang, sampai mendapatkan ketetapan. Besar biaya satuan BOS Tahun Anggaran 2012 dan 2013 yang diterima oleh sekolah termasuk BOS buku, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan:

1. SD/SDLB :Rp580.000,- /siswa/tahun.
  2. SMP/SMPLB/SMPT/SATAP :Rp710.000,- /siswa/tahun
- (Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS, 2012: 2)

##### **Penyaluran Dana BOS di Kabupaten Pacitan.**

Tahap pertama: Penyalurannya dari Kas Umum Negara (KUN) ke Kas Umum Daerah (KUD) Provinsi. Mekanisme penyaluran dan adan pelaporannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Sedangkan tahap kedua: Penyaluran dan dari KUD provinsi ke rekening sekolah. Mekanisme Penyaluran dana dan pelaporannya akan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

##### **Monitoring Evaluasi dan Pengawasan Penggunaan Dana BOS**

Merujuk Permendikbud RI Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Operasional Sekolah Tahun 2012 menyatakan bahwa untuk



monitoring dan supervisi dana BOS bentuk kegiatan yang dilakukan adalah pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah yang terjadi pada pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah. Tujuan kegiatannya adalah untuk meyakinkan bahwa dana BOS diterima oleh pihak yang berhak menerima dalam jumlah, waktu, cara dan penggunaan yang tepat.

### **Pelaporan, Pengawasan dan Pemeriksaan Penggunaan Dana BOS di Kabupaten Pacitan**

Setiap pengelola program BOS mulai tingkat sekolah, tingkat kabupaten, tingkat provinsi sampai dengan tingkat pusat memiliki kewajiban untuk melaporkan kegiatan yang sudah dilakukan dalam operasional penggunaan dana BOS sesuai ketentuan yang berlaku. Temuan yang dideskripsikan pada pelaporan ini meliputi penggunaan dana BOS tahun 2011 sampai dengan tahun 2013.

Pelaporan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) meliputi pelaporan penyerapan dana bantuan, pelaporan hasil monitoring dan evaluasi dan pelaporan pengaduan masyarakat.

### **Tingkat Kinerja Pada Program BOS**

Untuk memahami tentang tingkat kinerja kebijakan pada program BOS perlu adanya informasi apa yang sudah dikerjakan oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten dan Tim Manajemen BOS Sekolah guna melengkapi kebutuhan data yang harus mendukung kejelasan tingkat kinerja kebijakan program BOS di Kabupaten Pacitan.

### **Tingkat Kinerja Tim Manajemen BOS Kabupaten Pada Program BOS.**

Pada tahapan ini menguraikan tentang segala sesuatu yang telah dikerjakan dan dilaksanakan oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten Pacitan, sesuai Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45/15.A/KPTS/ 408.21/2013 tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2013 tanggal 2 Januari 2013 dengan tugas seperti yang termuat pada Keputusan Bupati Tersebut.

Memperhatikan pendapat dari Keban (2008:227) bahwa tingkat kinerja organisasi berhasil jika efektif dimana tujuan organisasi atau nilai-nilai sebagaimana ditetapkan dalam visinya tercapai.

Sedangkan Stephen P. Robbins (1990: 53-77) bahwa dalam mengukur kinerja tidak dapat lepas dari efektivitas, maka pelaksanaan kebijakan dalam penelitian ini adalah Tim Manajemen BOS Kabupaten Pacitan melakukan 4 (empat) pendekatan yaitu pendekatan "*goal-attainment*", pendekatan *systems*, pendekatan "*strategic-constituen*" dan pendekatan "*competing value*".

Pertama, pada pendekatan "*goal attainment*" adalah mengukur tingkat kinerja kebijakan program BOS sampai seberapa jauh ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan pada program BOS yaitu meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. (Mendikbud, 2012:2).

Kedua pada pendekatan "*systems*" ini mengukur tingkat kinerja kebijakan program BOS dipandang dari sisi ketersediaan sumber daya yang tersedia. Tim Manajemen BOS Sekolah yang berada SD dan SMP seluruh wilayah Kabupaten Pacitan.

Ketiga, pada pendekatan "*strategic-constituen*" mengukur tingkat kinerja kebijakan program BOS dipandang melalui kepuasan konstituen kunci, dukungan

konstituen kunci sangat dibutuhkan oleh Tim Manajemen BOS untuk mempertahankan eksistensi selanjutnya.

Keempat, pada pendekatan “*competing value*” mengukur tingkat kinerja kebijakan mengarah kepada kriteria keberhasilan yang dipentingkan Tim Manajemen BOS Kabupaten Pacitan seperti keadilan, pelayanan, pembagian tugas telah sesuai dengan kepentingan konstituen.

### **Tingkat Kinerja Tim Manajemen BOS Sekolah Pada Program BOS**

Terdapat perbedaan antara tugas pokok dan tanggung jawab yang harus ditanggung antara Tim Manajemen BOS Kabupaten dengan Tim Manajemen BOS Sekolah. Dimana tugas yang dikerjakan Tim Manajemen BOS Kabupaten pada dasarnya merencanakan, mengupayakan dana BOS bagi sekolah sampai dengan kepastian bahwa kinerjanya mendapatkan hasil yang diharapkan BOS dapat diterima sekolah tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan secara singkat tugas Tim Manajemen Sekolah adalah mengupayakan kelancaran dapat dicairkannya dana BOS sesuai dengan tahun anggaran yang ditentukan, mengelola dana BOS sesuai dengan pedoman yang berlaku dan membuat laporan yang diperlukan sesuai dengan pedoman yang berlaku. Menurut Dwiyanto (2006:47) penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya. Untuk birokrasi publik informasi mengenai kinerja tentu sangat berguna untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan oleh birokrasi itu memenuhi harapan dan memuaskan masyarakat. Beberapa indikator yang digunakan kinerja birokrasi yaitu: Produktifitas; Kualitas Layanan; Responsivitas dan Responsibilitas.

### **Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Tingkat Kinerja Pada Program BOS**

Faktor pendukung antara lain: (1) Kompetensi individual pada Tim Manajemen BOS Kabupaten Pacitan; (2) Tim Manajemen BOS Sekolah bersama Komite Sekolah mempunyai kesungguhan dalam mengelola BOS; (3) Ketersediaan sumber daya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (4) Kepuasan konstituen; (5) Pembagian tugas telah sesuai dengan kepentingan konstituen.

Faktor penghambat antara lain: (1) Kompetensi individu pada kinerja kebijakan program BOS belum merata; (2) Dana untuk pembiayaan perencanaan, pembiayaan pelaksanaan dan pengawasan bagi personal yang melaksanakan kegiatan tidak tersedia; (3) Kualitas layanan kepada masyarakat merupakan kegiatan yang sangat diperlukan masih kurang.

### **Tingkat Efisiensi Pada Program BOS**

Dalam membahas efisiensi selalu dikaitkan dengan efektif, tingkat efisiensi kebijakan program BOS, dalam hal membahas efisiensi dapat dilihat dari beberapa sudut pandang antara lain sumber daya manusia yang mengerjakan dan melayani kepentingan BOS, dana yang disiapkan untuk program BOS dan penggunaan dana BOS.

### **Tingkat Efisiensi Penggunaan Dana Pada Program BOS**

Pada pembahasan ini yang menjadi pusat perhatian pembahasan efisiensi adalah pada sekolah bersama Tim Manajemen BOS Sekolah dalam menggunakan dana BOS,

yang bersinggungan dengan kepentingan langsung dari masyarakat. Efisiensi dana yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan tidak dapat lepas dari perencanaan yang telah disusun dengan perhitungan yang matang sebelumnya. Untuk itu sekolah setiap awal tahun pelajaran secara khusus mengupayakan perbaikan perencanaan kegiatan pembelajaran untuk kepentingan keberhasilan siswa dalam belajar untuk menunjang perencanaan pembiayaan yang diperlukan untuk operasionalnya.

Tingkat efisiensi pada kebijakan program BOS dapat diupayakan oleh para pengelola BOS dengan merencanakan, melaksanakan kegiatan sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan dengan cermat sehingga setiap biaya yang dikeluarkan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya untuk pencapaian tujuan BOS.

### **Pemberdayaan Sekolah Di Kabupaten Pacitan**

Sesuai dengan teori Parsons dalam Suharto (2004) bahwa pemberdayaan sebagai proses dimana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi, mengontrol, mempengaruhi terhadap kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhinya. Teori tersebut dilengkapi oleh pendapat Mardikanto (2013:33) bahwa: “Pemberdayaan dalam bidang pendidikan, juga berarti kemampuan dan keberanian untuk melakukan perubahan social, ekonomi, politik, maupun budaya untuk terus menerus memperbaiki kehidupan “.

Pemberdayaan sekolah pada kebijakan BOS keberhasilannya bergantung keterlibatan dan aktifitas kepala sekolah, guru, siswa, orang tua/wali siswa dan tenaga administrasi sekolah dalam bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dalam mendukung pengembangan, penguatan potensi/daya dan pencapaian tujuan (kemadirian) pada sekolah.

### **Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat pada Pemberdayaan Sekolah di Kabupaten Pacitan**

Faktor pendukung antara lain: (1) Dukungan peraturan yang ada membantu sekolah untuk bergerak sehingga tingkat kinerja, tingkat efisiensi, tingkat *outcome* dan dampak kebijakan pada program BOS dapat berkembang; (2) Penguatan potensi/daya pada sekolah; (3) Kepercayaan dari pemerintah dalam mengelola BOS. Faktor penghambat antara lain: (1) Kompetensi personal yang kurang merata; (2) Sosialisasi tentang program BOS yang masih lemah.

### **Pemberdayaan Komite Sekolah di Kabupaten Pacitan**

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 56 ayat 3 menyatakan bahwa: Komite Sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat pendidikan.

Dengan keberadaan komite sekolah maka terdapat partisipasi komite sekolah dalam peningkatan kualitas pengambilan keputusan dan perencanaan sekolah yang dapat mengubah pola pikir, keterampilan, dan distribusi kewenangan atas individual dan masyarakat yang dapat memperluas kapasitas manusia meningkatkan taraf hidup dalam sistem manajemen pemberdayaan sekolah.

## **Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat pada Pemberdayaan Komite Sekolah di Kabupaten Pacitan**

Faktor pendukung antara lain: (1) Terdapatnya komitmen yang tinggi dari komite sekolah untuk membantu sekolah; (2) Dukungan komite sekolah mengupayakan pemenuhan kebutuhan sekolah; (3) Kelancara koordinasi dan komunikasi komite sekolah dengan sekolah; (4) Sikap proaktif kepala sekolah dalam menyikapi permasalahan. Faktor penghambat antara lain: (1) Kesibukan para pengurus komite sekolah; (2) Waktu yang tersedia untuk mengurus sekolah sangat terbatas.

## **5. SIMPULAN**

Dengan berdasarkan uraian dari proses dan hasil penelitian dapat dikemukakan beberapa simpulan yang diperoleh dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tingkat kinerjakebijakan pada program BOS sudah mencapai tujuan kebijakan BOS dimana para siswa sudah dapat terlayani kebutuhan untuk membiayai kegiatannya. Sasaran kebijakan BOS sudah sesuai dengan membantu siswa miskin dan meringankan beban siswa keseluruhan dari pembiayaan pendidikan.
2. Tingkat efisiensi kebijakan BOS kurang sesuai dengan keberadaan kebijakan dana BOS dengan munculnya besaran biaya dan kemanfaatan ada program BOS. Tingkat efisiensi kebijakan BOS di Kabupaten Pacitan dipengaruhi oleh besar kecilnya dana BOS yang digunakan untuk mendapatkan hasil yang lebih besar.
3. Tingkat keluaran (outcome) kebijakan pada program BOS mencerminkan adanya peningkatan hasil yang dicapai oleh sekolah dan komite sekolah dalam pengembangan, peningkatan potensi/daya dan kemandirian.
4. Dampak kebijakan pada program BOS sudah dapat dirasakan masyarakat baik dampak positif maupun dampak negatif.

## **Rekomendasi**

Setelah memperhatikan beberapa implikasi hasil penelitian, baik secara praktis maupun teoretis maka menyarankan dan sekaligus merekomendasikan kepada sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan seperti sebagaimana berikut:

1. Dengan adanya kebijakan program BOS pada sekolah yang melibatkan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan maka untuk kelancaran dana bantuan sampai di sekolah perlu mendapatkan penanganan yang seksama sehingga tidak terjadi keterlambatan, berangkat dari pemahaman ini jika terjadi keterlambatan dapat berakibat konsentrasi pelaksana di sekolah menjadi tidak memusat dan peningkatan mutu pendidikan menemui hambatan.
2. Dengan kebijakan program BOS maka diketahui tingkat efisiensi pada pengelolaan dana BOS dengan munculnya besaran biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan kebijakan BOS.
3. Untuk lebih mengoptimalkan tingkat keluaran (*out come*) pada pengelolaan dana BOS dapat ditelusuri dengan memperhatikan kesesuaian antara penggunaan dana BOS dengan Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS).
4. Dampak kebijakan pada program BOS ditunjukkan adanya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), peningkatan kuantitas dan kualitas lulusan ujian nasional merupakan tanggung jawab sekolah yang sangat perlu adanya dukungan komite sekolah sebagai *representative* masyarakat.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 1997, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Achoka, JS K ; Stephen O. Odebero; Julius K. Maiyo and Ndiku J. Mualuko, 2007, *Access To Basic Education In Kenya: Inherent Concerns* <http://www.academicjournals.org/err/PDF/pdf%202007/Oct/Achoka%20et%20al.pdf> diunduh tanggal 23 Juli 2013.
- Adi, Isbandi R, 2008, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Adi, Isbandi R, 2001, *Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*, Jakarta: LPFE-UI.
- Ahmad Ainur Rohman, M. Mas'ud Sa'id, Saiful Arif, Purnomo, 2008, *Reformasi Pelayanan Publik*, Malang: Averroes Pres
- Ambar Teguh, Sulistiyani, 2004, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- A.M.W. Pranarka dan Vidhandika Moeljarto, 1996, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta: CSIS.
- Anderson, James E, 1979, *Public Policy Making*, New York: Holt Rinehart and Winston
- Anggoro, Toha M, 2007, *Metode Penelitian*, Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.
- Arikunto, Suharsimi, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar S, 1997, *Reliabilitas dan Validitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badan Pusat Statistik, 2007, *Berita Resmi Statistik No.38/07/Th X,2 Juli 2007*, Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan, 2012, *Pacitan Dalam Angka 2012*, Pacitan: BPS Pacitan
- Badan Pusat Statistik, 2013, *Laporan Bulanan data Sosial Ekonomi*, Jakarta: BPS.
- Bernardin, H.J & J.E.A. Russell, 1993, *Human Resource Management*, Singapura: MacGraw Hill, Ins
- Burhan, Bungin, 2006, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial lainnya*, Jakarta: Fajar Interpratama Offset.
- Burhan, Bungin, 2001. *Metodologi Penelitian Sosial. Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Bupati Pacitan, 2006, *Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2006-2011*, Pacitan: Pemda Kabupaten Pacitan.
- Chambers Robert. 1983. *Pembangunan Desa (Mulai dari belakang)*. Jakarta: LP3ES.
- Cornell Empowerment Group. (1989). Empowerment and family support. *Networking Bulletin*, I(2), I-23.

- Craig Gary and Mayorie Mayo, 1995, *Community Empowerment A Reader in Participation and Development*, London&New Jersy: Zed Books Ltd.
- Danim Sudarwan, 2001, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2007, *Pemberdayaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*, Jakarta: Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2006, *Pemberdayaan Komite Sekolah*, Jakarta: Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*, Jakarta: Depdiknas.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2010, *Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah ( BOS)*, Jakarta: Depdiknas.
- Didin Kurniadin, 2009, *Politik Anggaran Pendidikan; Konsep dan Kebijakan Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia*, Jurnal Penelitian Pendidikan, Vol. 1, No. 2.
- Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, 2012, *Rekap Analisis Hasil Ujian Nasional SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Kabupaten Pacitan Tahun 2011/2012*, Pacitan: Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.
- Dror, H, 1968 , *Public Policy re-exsamed*, New York : Chandler
- Dunn, N William, 2000, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Dye, Thomas R. 1995. *Understanding Public Policy*. New Jersey:Prentice Hall.
- Easton, David, 1965, *A System Analysis of Political Life*, New York: Willey.
- Edi, Suharto, 2009, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Edi Suharto, 2004, *Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial: Studi Kasus Rumah Tangga Miskin di Indonesia*, Bandung: STKSPress.
- Edward B.Fiske, Helen F.Ladd, 2003, *Balancing Public and Private Resources for Basic Education: School Fees in Post-Apartheid South Africa*, <http://research.sanford.duke.edu/papers/SAN03-03.pdf> diunduh tanggal 19 Juli 2013.
- Eko Prasajo, Teguh Kurniawan dan Azwar Hasan, 2004, *Reformasi Birokrasi dalam Praktek: Kasus di Kabupaten Jembrana*, Depok: Pusat Kajian Pembangunan Administrasi Daerah dan Kota FISIP UI.
- Eko Sutoro, 2002, *Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Materi Diklat Pem-berdayaan Masyarakat Desa, yang diselenggarakan Badan Diklat Propinsi Kaltim, Desember 2002.
- Elliot, Charles, 1987, *Prefect Empowerment*, UNESCO.
- Engkoswara, 1998, *Kecenderungan Kehidupan Di Indonesia Menjelang Tahun 2000 dan Implikasi Terhadap Sistem Pendidikan*, Jakarta: Intermedia.
- Fattah, Nanang, 1991, *Landasan Manajemen Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Friedmann, John, 1981, "Kemiskinan Urban di Amerika Latin", dalam Andre Bayo

- Ala (ed)., *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*, Liberty, Yogyakarta, hlm124-146.
- Freidman, 1993, *EMPOWERMENT (The Politics of Alternative Development)*, Blackwell Publishers Three Cambridge Center USA.
- Gaspersz, Vinsent & Jhon W, 2004, *Perencanaan Strategik Sektor Publik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Gemari, 2003, 7Tahun Yayasan Damandiri; *Menyelamatkan Kondisi Ke-hidupan*. Edisi24/tahun III.
- Griffin. 1984, *Management*, USA: Houghton Mifflin Company
- Hadani, Nawawi, 1981, *Administrasi Pendidikan*, Jakarta: Gunung Agung.
- Hersey, Paul and Blanchard, H,Kenneth, 1982. *Management of Organization Behaviour*.New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- Hikmat, H, 2010, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Humaniora Utama Press.
- Howlet, Michael and Ramesh, M, 1995, *Studying Public Policy*, Toronto: Oxford University Press.
- Ibnu, Samsi, 1994, *Hubungan Masyarakat*, Yogyakarta: BPA Universitas Gajahmada.
- Ife,Jim,1995. *Community Developmen Creating Community Alternatives, Vision Analisis and Practices*, Australia, Longman Inc.
- Islami, M Irfan, 2000, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Joko Widodo, 2011, *Analisis Kebijakan Publik*, Malang: Bayumedia Publishing
- Karding, Abdul Kadir, 2008, *Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kota Semarang*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Kartasasmita, Ginandjar, 2008,*Dewan Perwakilan Daerah dan Otonomi Daerah*,Makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Institut Teknologi Bandung (ITB) Dalam Rangka Memperingati Seratus Tahun Kebangkitan Nasional. Bandung, 17 Mei 2008.
- Keban, Yeremias T, 2008, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep Teori dan Isu*, Yogyakarta: Penerbit Gava Media
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia-Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2010. *Tinjauan Ekonomi & Keuangan Daerah Propinsi Jawa Timur*, <http://www.djpk.depkeu.go.id> , diunduh tanggal 29 Mei 2013 pukul 09.20.
- Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2012, *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggung-jawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2013*, Jakarta: Kemdikbud.
- Klaus Schwab, 2014, *Global Competitiveness Report 2013-2014*, Geneva: The World Economic Forum.
- Kusnadi, 2010, *Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*, Bandung: Humaniora.

- Kwame Akyeampong, Jerome Djangmah, Abena Oduro, Alhassan Seidu and Frances Hunt, 2007, *Access to Basic Education in Ghana: The Evidence and the Issues*, [http://www.create-rpc.org/pdf\\_documents/Ghana\\_CAR.pdf](http://www.create-rpc.org/pdf_documents/Ghana_CAR.pdf) diunduh pada tanggal 22 Juli 2013.
- Machali, Imam, 2009, *Politik Pendidikan Dalam Bingkai Kebebasan*, Yogyakarta: Jurnal Paradigma.
- Madekhan, Ali, 2007, *Orang Desa Anak Tiri Perubahan*, Yogyakarta: Averroes Press.
- Mahmudi, 2005, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN
- Margono, 2007, *Metode Penelitian Pendidikan Komponen MKDK*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Marzuki, 2002. *Metodologi Riset*, Yogyakarta: BEFE-UII.
- Mazmanian, Daniel A, and Sabatier Paul A, 1983, *Implementation and Public Policy*, London: Scott, Foresman and Company.
- McArdle, Jeremy, 1989, Development Tools of Trade, *Community Quarterly Journal* 16:47-54.
- Menteri Pendidikan Nasional, 2002, *Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*, Jakarta: Depdiknas.
- Mendikbud, 2013, *Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2010-2014*, Jakarta: Kemdikbud.
- Miles, Matthew. B, A. Michael Huberman, 1992, *Qualitative Data analysis*. Sage Publication, Ins, diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi, 2009, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta UI-Pres.
- Moleong, Lexy J, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moses O. Oketch and Caine M. Roselton, 2007, *Policies on Free Primary and Secondary Education in East Africa: A Review of the Literature*, [http://www.create-rpc.org/pdf\\_documents/PTA10.pdf](http://www.create-rpc.org/pdf_documents/PTA10.pdf) diunduh tanggal 20 Juli 2013.
- Mulyamah, Wigniyodisastro, (1988), *Tinjauan Singkat Mengenai Aspek-Aspek Penting Industri Kecil*, Jakarta: Departemen Perindustrian
- Nakamura, P.T. & F. Smallwood, 1980, *The Politics of Policy Implementation*, New York: St. Martin Press.
- Nicholas Henry, 1999, *Public Administration and public affairs* (Sixth edition), New Delhi: Prentice-Hill
- Nurkolis, 2006, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Jakarta: PT. Grasindo.
- Nwagboso, Chis I, 2012, Public Policy and the Challenges of Policy Evaluation in the Third World. *British Journal of Humanities and Social Science*, Vol.5 (1)
- Okoro, J, 2005, *Public Policy Analysis: A theoretical overview*, Calabar: Ojies Products



- Parson, Wayne, 1997, *Public Policy: An Introduction the theory and prespective of policy Analysis*, Cambrige: Edward Elgar Publishing Inc
- Payne, M, 1997, *Social Work and Community Care*. London: McMillan.
- Pemerintah Kabupaten Pacitan, 2012, *Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah*, Pacitan: Pemda Kabupaten Pacitan.
- Peraturan Pemerintah RI, 2005, *PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasioal Pendidikan*, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah RI, 2008, *PP No. 48 Tahun 2008 tentang Standar Pembiayaan Pendidikan*, Jakarta.
- Prawirosentono, Suyadi. 1997, *Kebijakan Kinerja Karyawan*, Yogyakarta: BPFE
- Robbins, Sthepen P, 2008, *Perilaku Organisasi*, Klaten: PT Intan Sejati.
- Robbins. P. Stepen, 2001, *Perilaku Organisasi, Konsep Kontroversi, Aplikasi*, Jakarta: Prenhalindo
- Robbins, Sthepen P, 1990, *Teori Organisasi; Struktur, Desain dan Aplikasi* terjemahan Yusuf Udaya, Jakarta: Arcon.
- Robbins, Stephen P. 1996. *Perilaku Organisasi Konsep, Kontroversi, Aplikasi*, Jakarta: P.T. Prenhallindo.
- Rokhman, Wahibur JR, 2001, *Pemberdayaan dan Komitmen. Upaya Organisasi dalam Menghadapi Persaingan Global "Manajemen dan Usahawan"* No 6, Juni, Hal 26 – 31.
- Rossi, P.H. and Wright S.R, 1977, "Evaluation research: An assessment of theory, practice and politics". *Quarterly journal of public administration*, 8, 291-262
- Sarjuli, 2001, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, Solo: Era Intermedia
- Sallis, Edward, 1993, *Total Quality Management in Education*, London: Kogan Page Limited.
- Samodra, Wibawa, 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Sharma, M.P & Sadama, B.I, 2006, *Public Policy administration in theory and practice*, New Delhi: Kitab Mahal
- Siagian, S.P, 1973. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Simamora Henry, 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: STIE YKPN.
- Singarimbun, M, 1984, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3S.
- Stoner, James A.F., Charles Wankel, 1986, *Manajemen (alih bahasa Wihelmus W Bakowatun)*, Jakarta: Intermedia.
- Subarsono, AG, 2005, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudarno Sumanto; Asep Suharyadi; Syaiku Usman; Sri Kusmastuti Rahayu; Nuning Ahmadi; Widjayanti I Suharyo, 2006, *Kajian Cepat PKPS-BBM Bidang Pendidikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2005*, Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU.

- Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*, Bandung: Alfabeta.
- Suhendra, K, 2006, *Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Alfabeta.
- Sumardi, 1992, *Pengantar Administrasi Pemerintahan*, Bandung: STKS
- Sumodiningrat, Gunawan, 2002, *Pemberdayaan Masyarakat Dan Jaring Pengaman Sosial*, Jakarta: PT Gramedia.
- Sunyoto, Usman, 2004, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Surya Dharma, 2012, *Manajemen Kinerja: Falsafah Teori dan Penerapannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sutrisno R. 2001. *Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Pembebasan Kemiskinan*. Yogyakarta: Philosophy Press bekerja sama Fakultas filsafat UGM
- Tilaar, H.A.R & Nugroho Riant, 2008, *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Totok Mardikanto, Poerwoko Soebiato, 2013, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam perspektif Kebijakan Publik*, Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Perubahan Kedua Tahun 2000, Jakarta: Sekretaris Jendral MPR-RI
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2005 tentang *Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom*.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 tentang *Guru dan Dosen* 2006. Malang: CV. Eka Jaya.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang *Kesehatan*.
- USAID, 2007, *Policy Research on Access to Quality Basic Education For Muslim Learners* <http://www.seameo-nnotech.org/seameoportal/media/ckupload/files/Policy-Research-on-Access-to-Quality-Basic-Education-for-Muslim-Learners.pdf>. diunduh tanggal 22 Juli 2013
- Usman, Husaini. (2008). *Manajemen Teori Praktik dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Weis, Carol H, 1972, *Evaluation Research. Methods for Assesing Program Effectiveness*, New Yersey: Prentice Hall.
- Wisnu UR.Dicky dan Siti Nurkhasanah, 2005, *Teori Organisasi, Struktur dan Desain*, Malang: UMM Press
- World Economic Forum, 2004, *Global Competitiveness Report 2004-2005*, Navarra: IESE Business School Universidad de Navarra.
- Yin, K Robert, 1996, *Studi Kasus*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Zamroni, 2001, *Pendidikan untuk Demokrasi Tantangan Menuju Civil Society*, Yogyakarta: Bigraf Publishing.